

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Keynesian

John Maynard Keynes merupakan salah satu ekonom paling berpengaruh dalam sejarah ekonomi modern yang pemikirannya banyak mengubah cara pandang terhadap fungsi pasar dan peran pemerintah dalam perekonomian. Teorinya lahir pada masa Depresi Besar tahun 1930-an, ketika dunia mengalami penurunan produksi secara besar-besaran, meningkatnya pengangguran, serta kegagalan sistem pasar bebas dalam memulihkan keseimbangan ekonomi. Pada masa itu, teori ekonomi klasik masih mendominasi dan berasumsi bahwa pasar akan selalu menyesuaikan diri melalui mekanisme harga dan upah, sehingga lapangan kerja penuh dapat tercapai secara alami tanpa campur tangan pemerintah. Namun, kenyataan yang terjadi justru bertolak belakang dengan teori tersebut.

Dalam karya monumentalnya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936) (Tarumingkeng, 2024), Keynes menolak pandangan klasik tersebut dan menegaskan bahwa perekonomian dapat berada pada posisi keseimbangan dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Ia berpendapat bahwa sumber utama ketidakstabilan ekonomi bukan terletak pada sisi penawaran, melainkan pada sisi permintaan. Jika permintaan agregat melemah, maka kegiatan produksi akan menurun, pendapatan masyarakat berkurang, dan pengangguran meningkat. Dengan demikian, kestabilan ekonomi dan kesempatan kerja tidak dapat dijelaskan hanya oleh mekanisme pasar semata, melainkan dipengaruhi oleh besarnya permintaan efektif yang ada dalam perekonomian.

Menurut pandangan Keynes, keputusan investasi dipengaruhi oleh *marginal efficiency of capital*, yakni perbandingan antara tingkat pengembalian yang diantisipasi dari proyek investasi baru dengan tingkat bunga yang berlaku. Apabila ekspektasi keuntungan menurun atau biaya pinjaman (suku bunga) relatif tinggi, arus investasi akan melemah, mengakibatkan kontraksi dalam aktivitas produksi. Dampak selanjutnya, pengangguran meningkat bukan karena kekakuan upah, melainkan akibat penundaan ekspansi oleh perusahaan yang menilai prospek keuntungan tidak memadai. Oleh karena itu, Keynes menekankan perlunya intervensi kebijakan yang bertujuan merangsang keyakinan dan minat investasi, baik melalui instrumen moneter, seperti penurunan suku bunga, maupun melalui pengeluaran publik yang produktif.

Keynes kemudian memperkenalkan gagasan *multiplier effect*, yang menjelaskan bagaimana setiap kenaikan investasi awal dapat menghasilkan peningkatan pendapatan nasional dan kesempatan kerja yang berlipat. Ketika investasi dilakukan, pekerja memperoleh pendapatan, lalu menggunakannya untuk konsumsi, dan konsumsi tersebut kembali menciptakan permintaan baru yang menstimulasi produksi lanjutan. Rantai reaksi ini memperluas lapangan kerja di berbagai sektor dan menurunkan pengangguran (Sá & Luís, 2024). Oleh karena itu, menurut Keynes, jalan keluar dari pengangguran bukan dengan menekan upah, melainkan dengan memperbesar investasi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang mendorong permintaan efektif. Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, peningkatan penanaman modal merupakan wujud nyata dari mekanisme

investasi Keynesian dalam menggerakkan roda produksi dan membuka lapangan kerja baru (Gbohoui, 2021).

Selain investasi, Keynes juga menyoroti pentingnya pendapatan dan upah dalam menjaga stabilitas permintaan agregat. Dalam pandangan klasik, penurunan upah dianggap sebagai solusi untuk mengurangi pengangguran. Namun, Keynes berpendapat bahwa penurunan upah justru dapat memperburuk keadaan, karena daya beli masyarakat menurun dan konsumsi berkurang. Ketika konsumsi menurun, permintaan terhadap barang dan jasa melemah, sehingga perusahaan kembali menurunkan produksinya. Dengan demikian, penyesuaian upah ke tingkat yang lebih rendah tidak serta-merta menciptakan lapangan kerja, tetapi justru memperdalam krisis ekonomi. Oleh karena itu, menjaga tingkat upah yang layak menjadi penting untuk mempertahankan daya beli dan stabilitas permintaan dalam perekonomian (Ulfa et al., 2025).

Pendekatan Dasar Teori Keynesian:

a. Permintaan Agregat (*Aggregate Demand*)

Dalam pandangan teori Keynesian, permintaan agregat mencerminkan total permintaan terhadap berbagai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu. Besarnya permintaan agregat tersebut ditentukan oleh empat komponen utama, yaitu pengeluaran konsumsi masyarakat, investasi yang dilakukan sektor swasta, pengeluaran pemerintah, serta ekspor bersih yang merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor (Sigalingging et al., 2024).

Komponen permintaan agregat terdiri dari:

$$AD = C + I + G + (X - M)$$

1. Konsumsi (C)

Konsumsi merupakan komponen terbesar dalam struktur permintaan agregat. Menurut Keynes, tingkat konsumsi tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diterima masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, kebiasaan, dan ekspektasi terhadap kondisi ekonomi di masa mendatang. Dengan demikian, perilaku konsumsi mencerminkan keyakinan serta preferensi masyarakat dalam menggunakan pendapatannya.

2. Investasi (I)

Investasi dalam pandangan Keynesian sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga serta ekspektasi keuntungan di masa depan. Aktivitas investasi bersifat fluktuatif karena bergantung pada kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi, yang disebut sebagai "*animal spirits*" yakni dorongan optimisme atau pesimisme pengusaha dalam mengambil keputusan bisnis.

3. Pengeluaran Pemerintah (G)

Keynes menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peran krusial dalam menggerakkan perekonomian, terutama ketika aktivitas sektor swasta melemah. Melalui kebijakan fiskal ekspansif, seperti peningkatan belanja publik, pemerintah dapat menstimulasi permintaan agregat dan membantu pemulihan ekonomi selama periode resesi.

4. Ekspor Neto (X-M)

Perdagangan internasional juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi permintaan agregat melalui ekspor neto, yaitu selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Namun, dalam analisis Keynesian, fokus utama tetap tertuju pada pengeluaran domestik karena stabilitas ekonomi lebih banyak bergantung pada kekuatan permintaan internal daripada perdagangan luar negeri.

Faktor yang mempengaruhi permintaan agregat:

1. Pendapatan

Peningkatan pendapatan masyarakat umumnya akan mendorong naiknya tingkat konsumsi. Namun, besarnya bagian dari pendapatan yang digunakan untuk membiayai konsumsi, yang dikenal dengan istilah *marginal propensity to consume*, dapat bervariasi antarindividu maupun kelompok masyarakat.

2. Suku Bunga

Tingkat suku bunga yang rendah berpotensi meningkatkan aktivitas investasi dan mendorong konsumsi, karena biaya pinjaman menjadi lebih ringan bagi pelaku usaha maupun rumah tangga.

3. Kebijakan Fiskal

Kebijakan pemerintah melalui instrumen belanja publik dan perpajakan memiliki pengaruh langsung terhadap permintaan agregat, sebab perubahan dalam pengeluaran atau pajak akan berdampak pada pola konsumsi dan investasi di dalam perekonomian.

b. Penawaran Agregat (*Aggregate Supply*)

Dalam pandangan ekonomi Keynesian, penawaran agregat menggambarkan keseluruhan jumlah output atau barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh perekonomian pada tingkat harga tertentu. Namun demikian, konsep penawaran agregat menurut Keynes memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan teori ekonomi klasik, terutama dalam hal asumsi mengenai fleksibilitas harga dan kemampuan pasar untuk mencapai keseimbangan secara otomatis (Rohman et al., 2024).

Faktor yang mempengaruhi penawaran agregat:

1. Kekakuan Upah dan Harga

Keynes berpendapat bahwa upah dan harga tidak selalu bersifat fleksibel terhadap perubahan kondisi ekonomi. Ketidakmudahan dalam penyesuaian tersebut dapat menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi serta menghambat tercapainya kapasitas produksi yang optimal.

2. Biaya Produksi

Peningkatan biaya input, baik berupa bahan baku maupun upah tenaga kerja, berpotensi menurunkan jumlah output yang ditawarkan dalam perekonomian karena produsen menghadapi tekanan terhadap margin keuntungannya.

3. Ketersediaan Sumber Daya

Jumlah dan kualitas faktor produksi seperti tenaga kerja serta modal memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa secara keseluruhan.

c. Interaksi antara Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat dalam Teori Keynesian

Dalam kerangka pemikiran Keynesian, keseimbangan ekonomi tercapai ketika permintaan agregat sama dengan penawaran agregat, namun keseimbangan tersebut tidak selalu berada pada tingkat output potensial (Meiriza et al., 2024). Perekonomian dapat mencapai keseimbangan pada kondisi di bawah lapangan kerja penuh karena lemahnya permintaan efektif, sehingga sebagian tenaga kerja tidak terserap meskipun bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Keynes berpendapat bahwa pengangguran tidak hanya dapat diatasi melalui peningkatan investasi semata, melainkan memerlukan dukungan dari berbagai faktor struktural dan makroekonomi yang saling memengaruhi. Ketidakseimbangan antara kapasitas produksi dan dinamika kegiatan ekonomi, yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan permintaan agregat, dapat memengaruhi permintaan tenaga kerja dan berimplikasi pada peningkatan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, Keynes menekankan pentingnya penerapan kebijakan ekonomi yang terpadu melalui peran pemerintah dan sektor produktif untuk memperkuat permintaan agregat serta mendorong perekonomian menuju keseimbangan yang mampu menurunkan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2. Konsumsi

Konsumsi merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan individu untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik yang bersifat pribadi maupun

rumah tangga (James A., 2001; Rezky & Chandriyanti, 2024). Besaran ini mencerminkan bagaimana rumah tangga menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya, sehingga dapat menggambarkan pola konsumsi, prioritas kebutuhan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengeluaran juga memperlihatkan bagaimana perubahan kondisi ekonomi, seperti kenaikan pendapatan, inflasi, atau perubahan harga komoditas, memengaruhi keputusan rumah tangga dalam membelanjakan pendapatannya. Selain mencerminkan perilaku konsumsi, indikator ini sering digunakan untuk menilai kondisi sosial-ekonomi masyarakat karena fluktuasi pengeluaran konsumsi dapat menunjukkan dinamika daya beli, tekanan ekonomi yang dirasakan rumah tangga, maupun tingkat ketahanan finansial mereka. Dengan demikian, konsumsi menjadi komponen penting dalam memahami pola pengeluaran masyarakat dan perubahan yang terjadi dalam struktur ekonomi suatu wilayah.

Dalam menghitung tingkat pengeluaran per kapita, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan rumus berikut:

$$\text{Pengeluaran per kapita} = \frac{\text{Total Pengeluaran Rumah Tangga}}{\text{Jumlah Anggota Rumah Tangga}}$$

Di samping itu, menurut teori keynes, rumus untuk menghitung tingkat pengeluaran konsumsi adalah sebagai berikut:

$$C = a + bY$$

Keterangan:

C : Konsumsi total

a : Konsumsi otonom, yaitu konsumsi minimum meskipun pendapatan nol

b : *Marginal Propensity to Consume* (MPC)

Y : Pendapatan disposibel

Berdasarkan persamaan tersebut, konsumsi masyarakat terdiri atas konsumsi otonom dan konsumsi yang dipengaruhi oleh pendapatan disposibel. Konsumsi otonom menunjukkan bahwa rumah tangga tetap melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar meskipun tidak memiliki pendapatan, sedangkan *Marginal Propensity to Consume* (MPC) menunjukkan besarnya tambahan konsumsi yang terjadi akibat peningkatan pendapatan disposibel. Dalam penelitian ini, tingkat konsumsi yang diukur melalui pengeluaran per kapita digunakan untuk menggambarkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan pendapatannya. Peningkatan konsumsi mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa yang pada akhirnya dapat mendorong aktivitas ekonomi, sehingga daerah dengan tingkat konsumsi yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai PDRB yang lebih besar.

2.1.2.1. Teori Pengeluaran Konsumsi

Beberapa teori klasik dan modern membahas dinamika pertumbuhan penduduk dan dampaknya terhadap perekonomian, di antaranya:

1. Teori Konsumsi Keynes (*Keynesian Consumption Theory*)

Secara ilmiah, teori konsumsi Keynes menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga terutama ditentukan oleh tingkat pendapatan disposibel pada periode berjalan. Keynes menjelaskan bahwa ketika pendapatan meningkat, konsumsi

juga akan meningkat, namun tidak sebesar kenaikan pendapatan tersebut karena sebagian pendapatan akan disisihkan sebagai tabungan. Dalam pandangannya, konsumsi terdiri atas konsumsi dasar (*autonomous consumption*) yang tetap dilakukan meskipun pendapatan rendah dan konsumsi tambahan (*induced consumption*) yang berubah mengikuti tingkat pendapatan. Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong permintaan agregat, yang selanjutnya memacu peningkatan produksi barang dan jasa dalam perekonomian.

2. Teori Pendapatan Permanen (*Permanent Income Hypothesis* - Milton Friedman)

Teori pendapatan permanen menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga tidak dipengaruhi oleh pendapatan sesaat atau pendapatan musiman, tetapi oleh pendapatan permanen yang diharapkan terjaga dalam jangka panjang. Secara ilmiah, rumah tangga cenderung melakukan *consumption smoothing*, yaitu menjaga konsumsi agar tetap stabil meskipun pendapatan aktual berfluktuasi. Pendapatan yang dianggap sementara, seperti bonus atau pendapatan yang hanya muncul pada periode tertentu, tidak akan banyak mengubah konsumsi karena tidak dianggap mencerminkan kemampuan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, teori ini menekankan bahwa ekspektasi pendapatan masa depan memainkan peran penting dalam menentukan perilaku konsumsi rumah tangga.

Asumsi:

- Tidak ada korelasi antara pendapatan permanen dengan pendapatan transitori (pendapatan sementara)
- Pendapatan transitori tidak memperhitungkan pengeluaran konsumsi

3. Teori Siklus Hidup (*Life-Cycle Hypothesis* - Modigliani & Brumberg)

Teori siklus hidup menyatakan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh perubahan pendapatan yang terjadi di berbagai tahap kehidupan individu. Secara ilmiah, rumah tangga merencanakan konsumsi dengan mempertimbangkan seluruh alur pendapatan sepanjang hidup, bukan hanya pada satu periode tertentu. Pada usia muda, konsumsi biasanya lebih besar daripada pendapatan karena individu masih belajar atau memulai karier. Pada usia produktif, pendapatan meningkat sehingga individu dapat menabung untuk masa depan. Sementara pada masa pensiun, ketika pendapatan menurun, tabungan digunakan untuk mempertahankan tingkat konsumsi. Teori ini menekankan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang dalam menjaga stabilitas konsumsi sepanjang siklus hidup.

Asumsi:

- Faktor sosial ekonomi sangat mempengaruhi pola konsumsi seseorang
- Orang akan membagi konsumsinya secara rata seumur hidup
- Perilaku konsumsi dipengaruhi oleh siklus hidup
- Tidak ada pendapatan bunga atas tabungan

Dari asumsi diatas, pola konsumsi dibagi menjadi 3 periode berdasarkan umur seseorang:

1. Usia 0 > usia kerja (dapat memperoleh penghasilan sendiri) – *Dissaving*
2. Usia bekerja (16-65 tahun) – *Saving*
3. Usia tua (diatas 65 tahun) – *Dissaving*

2.1.2.2. Jenis-Jenis Pengeluaran Rumah Tangga

1. Pengeluaran untuk Kebutuhan Makanan (*Food Expenditure*)

Pengeluaran untuk kebutuhan makanan mencakup seluruh belanja rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, seperti beras, lauk-pauk, sayuran, buah-buahan, makanan siap saji, hingga minuman. Jenis pengeluaran ini bersifat mendasar dan relatif tidak dapat ditunda karena merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap rumah tangga. Oleh karena itu, pengeluaran makanan umumnya bersifat inelastis dan tetap dilakukan meskipun pendapatan rumah tangga mengalami perubahan.

2. Pengeluaran untuk Kebutuhan Non-Makanan (*Non-Food Expenditure*)

Pengeluaran non-makanan meliputi berbagai kebutuhan yang tidak berkaitan langsung dengan konsumsi pangan, seperti pakaian, perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan rekreasi. Jenis pengeluaran ini lebih bervariasi dan cenderung bersifat elastis, sehingga peningkatan pendapatan seringkali diikuti oleh kenaikan pengeluaran pada kategori ini. Pengeluaran non-makanan juga mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga melalui kemampuan mereka memenuhi kebutuhan tambahan selain kebutuhan dasar.

3. Pengeluaran Konsumsi Berdasarkan Tujuan (COICOP)

Mengacu pada klasifikasi COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) yang digunakan oleh BPS (2024) dan lembaga statistik internasional, pengeluaran konsumsi dibedakan menurut tujuan konsumsi seperti perumahan, listrik dan bahan bakar, transportasi,

perlengkapan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, informasi dan komunikasi, hotel dan restoran, serta barang dan jasa lainnya. Pengelompokan ini memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai struktur konsumsi rumah tangga dan membantu menganalisis perubahan pola konsumsi dari waktu ke waktu.

4. Pengeluaran Konsumsi Esensial dan Non-Esensial

Pengeluaran esensial mencakup kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh rumah tangga, seperti pangan, perumahan, pendidikan dasar, dan layanan kesehatan. Sementara itu, pengeluaran non-esensial merupakan belanja untuk kebutuhan tambahan seperti hiburan, rekreasi, dan barang-barang mewah. Perbedaan kedua jenis pengeluaran ini penting untuk memahami prioritas rumah tangga dalam mengalokasikan pendapatan serta respon mereka terhadap perubahan ekonomi.

5. Pengeluaran Konsumsi Barang Tahan Lama dan Tidak Tahan Lama

Pengeluaran untuk barang tahan lama meliputi pembelian barang-barang yang memiliki umur pakai panjang seperti kendaraan, furnitur, dan peralatan elektronik. Sedangkan pengeluaran untuk barang tidak tahan lama mencakup barang-barang yang cepat habis digunakan seperti makanan, minuman, dan bahan bakar. Klasifikasi ini membantu membedakan pola konsumsi jangka pendek dan jangka panjang rumah tangga serta menunjukkan bagaimana rumah tangga menyeimbangkan kebutuhan harian dengan investasi dalam barang tahan lama.

2.1.3. Penanaman Modal Asing

Penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena berperan dalam membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat (Siregar, 2023; Puspitasari et al., 2024). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Penanaman Modal Asing (PMA) didefinisikan sebagai kegiatan investasi yang dilakukan oleh penanam modal asing untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia, baik yang sepenuhnya dimiliki asing maupun melalui kerja sama dengan penanam modal dalam negeri (Yulian & Rama, 2024).

Penanaman Modal Asing (PMA) sejatinya merupakan salah satu faktor yang mendorong kegiatan pembangunan ekonomi. PMA dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai sarana untuk mempercepat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam jangka panjang, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mankiw, 2003; Adi & Syahlina, 2020). Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) berperan dalam menambah modal yang tersedia di suatu wilayah, sehingga mampu mendorong aktivitas produksi baik barang maupun jasa. Selain itu, PMA juga bertujuan menyediakan sarana dan alat produksi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi di masa depan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Adanya investasi memungkinkan terbentuknya barang modal baru, yang pada gilirannya memerlukan lebih banyak faktor produksi. Hal ini berdampak pada perluasan lapangan kerja, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran (Rofii & Ardyan, 2017).

2.1.3.1. Teori Investasi

1. Teori Musgrave

Musgrave dalam Buku Ekonomi Publik (Ridwan & Nawir, 2021) menjelaskan bahwa seiring berjalannya proses pembangunan ekonomi, peran investasi swasta cenderung semakin meningkat dibandingkan dengan investasi pemerintah. Pada tahap awal pembangunan, pemerintah biasanya memiliki peran besar dalam mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi publik untuk menyediakan infrastruktur dan layanan dasar. Namun, ketika perekonomian semakin berkembang dan sektor swasta menjadi lebih kuat dan efisien, investasi swasta mengambil porsi yang lebih besar terhadap GDP, sementara proporsi investasi pemerintah terhadap GNP relatif menurun karena perannya lebih berfokus pada fungsi regulasi, stabilisasi, dan pelayanan publik. Musgrave juga menekankan bahwa investasi asing merupakan bagian dari investasi swasta yang dapat menjadi sumber pembiayaan tambahan bagi pembangunan, memperluas kapasitas produksi, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang dengan keterbatasan modal domestik.

2. Teori Neo Klasik

Menurut Robert Solow dalam buku Teori Ekonomi (2024), tujuan utama perekonomian adalah mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan melalui peningkatan output yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Model pertumbuhan Solow menjelaskan keterkaitan antara pertumbuhan persediaan modal, perkembangan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi dalam suatu perekonomian, serta implikasinya terhadap

total output barang dan jasa suatu negara (Mankiw, 2009). Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai hasil dari perubahan faktor produksi berupa modal fisik yang bersumber dari tabungan dan investasi, serta tenaga kerja yang berkembang seiring pertumbuhan populasi. Teknologi diperlakukan sebagai variabel eksogen yang mencerminkan tingkat efisiensi dan menjadi faktor yang menggambarkan interaksi antara modal dan tenaga kerja. Teknologi dalam konteks ini dipahami sebagai pengetahuan mengenai cara memproduksi secara lebih efisien. Peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan modal dan tenaga kerja mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi berlangsung melalui proses akumulasi modal yang mengarahkan perekonomian pada jalur pertumbuhan yang stabil dan optimal (Nurwanda & Rifai, 2018). Hubungan antara modal, tenaga kerja, teknologi, dan output dalam model pertumbuhan Solow umumnya direpresentasikan melalui fungsi produksi *Cobb-Douglas*. Fungsi ini menunjukkan bahwa output yang dihasilkan suatu perekonomian merupakan hasil kombinasi dari penggunaan modal, tenaga kerja, dan tingkat teknologi yang dimiliki. Secara matematis, fungsi produksi *Cobb-Douglas* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

Keterangan:

Y : Output barang dan jasa (Produk Domestik Bruto/PDB)

A : Tingkat kemajuan teknologi/*Total Factor Productivity* (TFP)

K : Stok modal fisik/kapital

L : Tenaga Kerja

α : Elastisitas output terhadap modal/kapital (persentase kenaikan PDB yang bersumber dari 1 persen penambahan modal fisik)

Fungsi produksi tersebut menunjukkan bahwa proses produksi tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal dan tenaga kerja, tetapi juga pada tingkat teknologi yang memengaruhi efisiensi penggunaan kedua faktor produksi tersebut. Modal yang bertambah melalui kegiatan investasi akan meningkatkan kapasitas produksi, sedangkan tenaga kerja berkontribusi dalam mengoperasikan dan mengoptimalkan penggunaan modal. Sementara itu, kemajuan teknologi memungkinkan penggunaan faktor-faktor produksi secara lebih produktif sehingga menghasilkan output yang lebih besar.

2.1.3.2. Jenis-Jenis Penanaman Modal

Penanaman modal dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yang umumnya dibedakan berdasarkan subjek pelaku serta bentuk investasi yang dilakukan. Berdasarkan subjeknya, Azizah et al. (2024) mengklasifikasikan penanaman modal menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Foreign Investment* (Penanaman Modal Asing)

Penanaman modal asing merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh pihak luar negeri, baik individu yang berkewarganegaraan asing, badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara lain, maupun pemerintah asing yang menanamkan modalnya di wilayah Republik Indonesia (Ramenggila et al., 2025). Investasi ini pada umumnya bertujuan untuk memperluas kegiatan usaha lintas negara, memperoleh keuntungan dari potensi pasar domestik Indonesia, serta mengakses sumber daya lokal seperti tenaga kerja, bahan baku, dan

infrastruktur. Kehadiran penanaman modal asing diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, seperti peningkatan arus modal, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan hubungan ekonomi internasional. Namun demikian, investasi asing juga memerlukan pengaturan yang jelas agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan ketergantungan ekonomi terhadap pihak luar.

2. *Domestic Investment* (Penanaman Modal Dalam Negeri)

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh individu berkewarganegaraan Indonesia, badan usaha yang berdiri berdasarkan hukum Indonesia, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah yang menanamkan modalnya di wilayah Negara Republik Indonesia (Ningrum et al., 2022). Tujuan utama investasi ini adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi nasional melalui optimalisasi sumber daya dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri berperan penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor. Selain itu, investasi domestik juga menjadi indikator penting bagi stabilitas ekonomi suatu negara karena mencerminkan tingkat kepercayaan pelaku usaha lokal terhadap kondisi ekonomi dan iklim investasi nasional.

Berdasarkan bentuknya, Yuniasih et al. (2018) mengklasifikasikan penanaman modal ke dalam dua jenis utama, yaitu:

1. *Direct Investment* (Investasi Langsung)

Investasi langsung merupakan bentuk penanaman modal di mana investor memiliki wewenang penuh untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan

dan pengawasan kegiatan perusahaan tempat modal tersebut ditanamkan. Dengan demikian, investor tidak hanya menanamkan dananya, tetapi juga berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan serta keputusan manajerial perusahaan (Kholiza et al., 2024). Keterlibatan yang tinggi ini membuat investor turut menanggung secara langsung risiko kerugian maupun memperoleh keuntungan dari aktivitas usaha yang dijalankan. Contoh dari investasi langsung adalah pendirian cabang perusahaan di negara lain atau penyertaan saham dengan hak kontrol dalam suatu perusahaan.

2. *Indirect Investment* (Investasi Tidak Langsung)

Penanaman modal tidak langsung, yang juga dikenal sebagai investasi portofolio, umumnya bersifat jangka pendek. Jenis investasi ini meliputi aktivitas transaksi di pasar modal dan pasar uang, sehingga digolongkan sebagai investasi jangka pendek karena proses jual beli saham maupun valuta asing dilakukan dalam periode waktu yang relatif singkat. Jangka waktu tersebut sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga saham dan nilai tukar mata uang di pasar (Satrianingtyas, 2023).

2.1.4. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan standar upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota dan berlaku bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut (Suffah et al., 2025). UMK berfungsi sebagai batas minimum yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja atau buruh atas hasil kerja selama satu bulan penuh. Penetapan UMK dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja agar tidak

menerima upah di bawah standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (2021), suatu kabupaten/kota dapat menetapkan UMK yang lebih tinggi daripada Upah Minimum Provinsi (UMP) apabila memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir yang lebih tinggi dibandingkan provinsi, atau selisih antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi selama tiga tahun terakhir bernilai positif serta lebih besar daripada provinsi. Dengan adanya UMK, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah.

Perhitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Formula perhitungan UMK tersebut memperhitungkan tiga komponen utama, yaitu upah minimum tahun berjalan, tingkat pertumbuhan ekonomi, serta inflasi.

Rumus perhitungannya:

$$UM_n = UM_t + (UM_t \times [\text{Inflasi} + (\text{Pertumbuhan Ekonomi} \times \alpha)])$$

Keterangan:

UM_n : upah minimum yang akan ditetapkan

UM_t : upah minimum tahun berjalan

Inflasi : inflasi provinsi

Pertumbuhan Ekonomi : pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota

α : indeks tertentu yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30.

Rumus diatas menunjukkan bahwa besaran upah minimum ditentukan berdasarkan upah minimum tahun berjalan yang disesuaikan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian ini bertujuan menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi daerah. Nilai α digunakan sebagai indeks yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dalam proses penetapan upah minimum.

2.1.4.1. Teori Upah

1. Teori Upah Klasik

Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo, yang memandang upah sebagai hasil dari mekanisme pasar tenaga kerja, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja (Priyono & Ismail, 2012). Terdapat konsep “*natural wage*” atau upah alamiah, yakni tingkat upah yang stabil di sekitar biaya hidup minimum pekerja. Jika upah naik di atas tingkat alamiah, penawaran tenaga kerja akan meningkat dan menurunkan upah kembali, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa mekanisme pasar cenderung menyeimbangkan upah, dan dalam konteks modern menjadi dasar perlunya intervensi pemerintah melalui kebijakan upah minimum ketika pasar tenaga kerja tidak berfungsi secara sempurna.

2. Teori Permintaan Tenaga Kerja

Teori permintaan tenaga kerja (*demand for labor*) dikembangkan oleh Alfred Marshall dan termasuk dalam aliran ekonomi neoklasik. Teori ini

menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*), yaitu permintaan yang muncul karena adanya kebutuhan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa (Nasution et al., 2025). Dalam pandangan ini, permintaan tenaga kerja tidak ditentukan secara langsung oleh keinginan untuk mempekerjakan tenaga kerja, melainkan oleh kebutuhan perusahaan dalam menghasilkan output. Semakin tinggi permintaan terhadap barang dan jasa, semakin besar pula kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja untuk meningkatkan produksi. Sebaliknya, apabila biaya tenaga kerja meningkat akibat kenaikan upah, perusahaan akan mempertimbangkan kembali jumlah tenaga kerja yang digunakan agar kegiatan produksi tetap efisien.

3. Teori Upah Keynesian

Teori upah menurut John Maynard Keynes menyatakan bahwa pasar tenaga kerja tidak selalu berada dalam kondisi keseimbangan sebagaimana diasumsikan oleh teori klasik, karena penurunan upah dapat menurunkan daya beli masyarakat dan permintaan agregat sehingga tidak secara otomatis meningkatkan kesempatan kerja (Tarumingkeng, 2024). Upah tidak hanya berperan sebagai biaya produksi, tetapi juga sebagai sumber pendapatan yang memengaruhi konsumsi rumah tangga, sehingga kebijakan upah minimum penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

4. Teori Upah Efisiensi

Teori ini dikembangkan oleh Akerlof dan Yellen yang menekankan bahwa pemberian upah di atas tingkat pasar dapat meningkatkan produktivitas, motivasi, dan loyalitas tenaga kerja, serta menurunkan tingkat absensi dan

pergantian karyawan (*turnover*) (Agusalim & Novianti, 2023). Upah yang lebih tinggi juga dapat menarik tenaga kerja yang lebih berkualitas dan meningkatkan disiplin kerja (Priyono & Ismail, 2012). Dengan demikian, kebijakan pemberian upah layak atau upah minimum tidak selalu merugikan perusahaan, karena dapat menjadi insentif positif bagi peningkatan produktivitas, efisiensi organisasi, dan stabilitas sosial ekonomi secara keseluruhan.

2.1.4.2. Jenis-Jenis Upah

Berdasarkan cara penetapannya, upah dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu upah nominal dan upah riil. Kedua jenis upah ini saling berkaitan dalam mencerminkan kesejahteraan pekerja serta kondisi ekonomi secara umum.

1. Upah Nominal

Upah nominal merupakan jumlah uang yang diterima pekerja sebagai balas jasa atas tenaga dan waktu yang dicurahkan selama periode kerja tertentu. Upah ini hanya menggambarkan nilai uang secara nominal, tanpa memperhitungkan daya beli terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan pekerja (Iswahyudi et al., 2020). Dengan demikian, upah nominal menunjukkan besarnya pendapatan dalam bentuk uang yang diterima pekerja sesuai dengan perjanjian kerja atau ketentuan perusahaan.

2. Upah Riil

Upah riil adalah nilai nyata dari upah nominal setelah disesuaikan dengan tingkat harga atau inflasi yang berlaku. Upah ini mencerminkan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Abduh, 2023). Meskipun upah nominal meningkat, kesejahteraan pekerja belum tentu membaik apabila inflasi

juga meningkat. Oleh karena itu, upah riil dianggap lebih menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kemampuan konsumsi tenaga kerja dibandingkan upah nominal.

2.1.5. Industri Kecil Menengah

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2024), Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah kegiatan produksi berbagai barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki skala produksi di atas usaha mikro namun di bawah industri besar, dan berperan penting sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan kegiatan usaha di bidang industri yang memiliki aset maksimal sebesar 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki omzet tahunan tidak lebih dari 25 miliar rupiah (Putra et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, industri kecil dan menengah diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerja, nilai aset, serta omzet tahunan. Industri kecil umumnya memiliki tenaga kerja antara 5 hingga 19 orang, sedangkan industri menengah memiliki 20 hingga 99 orang tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2006, IKM merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia serta memiliki ketahanan tinggi terhadap krisis ekonomi karena orientasi produksinya yang fleksibel dan berbasis sumber daya lokal (Yunanto, 2016).

Selain sebagai pencipta lapangan kerja, IKM juga berperan dalam memperkuat struktur ekonomi domestik, memperluas pemerataan pendapatan, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Pertumbuhan

industri kecil dan menengah menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dan kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah melalui kegiatan produksi. Oleh karena itu, jumlah IKM di suatu wilayah sering dijadikan indikator penting dalam menilai kinerja sektor industri dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha produktif berskala kecil dan menengah. Untuk memudahkan analisis berdasarkan sektor, jumlah IKM dapat dihitung secara sistematis menggunakan rumus berikut:

$$\text{Jumlah IKM}_{\text{sektor}} = \sum_{i=1}^n (\text{IKM Kecil}_i + \text{IKM Menengah}_i)$$

Keterangan:

$\text{Jumlah IKM}_{\text{sektor}}$: total industri kecil dan menengah pada suatu sektor tertentu

i : indeks sektor industri (misal: pangan, kerajinan, tekstil)

n : jumlah seluruh sektor industri yang dihitung

IKM Kecil_i : industri kecil pada sektor ke- i

IKM Menengah_i : industri menengah pada sektor ke- i

Rumus tersebut digunakan untuk menghitung total industri kecil dan menengah dengan menjumlahkan seluruh unit industri kecil dan industri menengah pada setiap sektor yang diamati. Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah keseluruhan IKM yang beroperasi dalam suatu wilayah dan dapat digunakan untuk menggambarkan perkembangan aktivitas sektor industri pada periode tertentu.

2.1.5.1. Teori Industri

1. Teori Pertumbuhan Industri

Nicholas Kaldor menekankan bahwa sektor industri, khususnya manufaktur, merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu negara

(Philip, 2017). Dalam pandangan Kaldor, pertumbuhan sektor industri tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan output nasional, tetapi juga mendorong produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan memperkuat kapasitas produksi suatu negara. Ia merumuskan *Kaldor's Laws*, yang menekankan hubungan erat antara pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk bagaimana ekspansi industri dapat menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan nasional. Dengan kata lain, Kaldor melihat industri sebagai inti dari proses pembangunan ekonomi, di mana dinamika produksi dan distribusi output industri memainkan peran sentral dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2. Teori Keunggulan Kompetitif

Michael Porter mengembangkan teori keunggulan kompetitif yang menekankan bahwa daya saing suatu negara atau wilayah dalam konteks industri sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, diantaranya kondisi faktor produksi, permintaan domestik, industri pendukung, serta strategi dan tingkat persaingan antar perusahaan (Davies & Ellis, 2000). Porter menjelaskan bahwa keberhasilan suatu industri tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal perusahaan, tetapi juga oleh kualitas lingkungan industri secara keseluruhan, termasuk keberadaan supplier, infrastruktur, dan mekanisme pasar yang memadai. Teori ini menekankan pentingnya strategi bisnis yang efektif, inovasi, dan persaingan yang sehat sebagai pendorong utama keunggulan kompetitif, sehingga negara atau wilayah dapat mempertahankan posisi yang unggul dalam

pasar global. Konsep ini juga menyoroti peran interaksi antar perusahaan dan industri pendukung dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan dan efisiensi.

3. Teori *Dual Sector Model*

Menurut W. Arthur Lewis dalam teori *Dual Sector Model*, sektor industri dipandang sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi karena berfungsi sebagai sektor modern yang mampu menyerap tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional yang memiliki surplus tenaga kerja (Nugraha et al., 2023). Dalam pandangan Lewis, sektor industri memiliki produktivitas dan keuntungan yang lebih tinggi sehingga mampu menarik tenaga kerja melalui upah yang lebih baik. Keuntungan yang diperoleh kemudian diinvestasikan kembali untuk memperluas produksi dan menciptakan lapangan kerja baru. Peran tersebut menjadikan sektor industri sebagai penggerak transformasi struktural dari sektor agraris berproduktivitas rendah menuju sektor modern yang lebih produktif serta mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang (Todaro & Smith, 2014).

2.1.5.2. Jenis-Jenis Industri

Secara umum, industri dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu bahan baku, skala usaha, jenis produk, dan teknologi/proses produksi. Berikut penjelasannya secara rinci:

1. Berdasarkan Bahan Baku

Menurut Ramli & Nartea (2017) yang merujuk pada pemikiran Fisher (1939) dan Clark (1940), perekonomian pada dasarnya terbagi ke dalam tiga

sektor utama yang mencerminkan tahapan proses produksi, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.

a. Industri Primer

Industri primer merupakan sektor industri yang memanfaatkan bahan baku langsung dari alam dengan pengolahan yang relatif sederhana. Contoh industri primer meliputi sektor pertanian, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Misalnya, pabrik pengolahan kopi yang mengubah biji kopi mentah menjadi produk siap jual atau industri kayu yang memproduksi papan dari pohon. Sektor ini sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam dan biasanya bersifat regional, karena bahan baku yang digunakan seringkali mudah rusak atau memiliki biaya transportasi yang tinggi.

b. Industri Sekunder

Industri sekunder adalah sektor yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi melalui proses produksi yang lebih kompleks. Contohnya meliputi industri tekstil yang mengolah kapas menjadi kain, industri makanan yang memproduksi barang siap konsumsi, serta industri otomotif yang merakit suku cadang menjadi kendaraan. Industri sekunder menjadi tulang punggung industrialisasi karena mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekadar mengeksport bahan mentah.

c. Industri Tersier

Industri tersier merupakan sektor yang tidak menghasilkan barang secara langsung, melainkan berfokus pada penyediaan jasa dan distribusi barang. Contoh sektor tersier termasuk perbankan, logistik, transportasi, perhotelan, dan perdagangan. Sektor ini memiliki peran strategis dalam menunjang kelancaran aktivitas ekonomi, karena menghubungkan produsen dengan konsumen serta meningkatkan efisiensi penyediaan barang dan jasa di pasar.

2. Berdasarkan Jenis Produk

a. Industri Barang Konsumsi

Industri barang konsumsi adalah sektor yang memproduksi barang yang ditujukan untuk dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Contohnya meliputi makanan, minuman, pakaian, serta produk elektronik rumah tangga (Ndoen, 2019). Industri ini cenderung sangat responsif terhadap perubahan permintaan konsumen, tren pasar, dan preferensi masyarakat. Selain itu, industri barang konsumsi juga memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi harian, karena barang-barang yang dihasilkan langsung menyentuh kebutuhan pokok maupun kebutuhan gaya hidup konsumen.

b. Industri Barang Modal

Industri barang modal memproduksi barang yang digunakan sebagai alat atau sarana produksi oleh industri lain, bukan untuk konsumsi langsung. Contohnya termasuk mesin, alat berat, kendaraan industri, dan peralatan

konstruksi. Industri ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor industri secara luas, karena ketersediaan barang modal memungkinkan perusahaan lain meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi, dan produktivitas. Dengan kata lain, industri barang modal menjadi pendorong utama pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor manufaktur yang lebih kompleks (Aminullah et al., 2014).

c. Industri Barang Setengah Jadi

Industri barang setengah jadi menghasilkan produk yang belum siap dikonsumsi, tetapi digunakan sebagai bahan baku oleh industri lain untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Contohnya meliputi baja lembaran, kertas, kain, atau plastik mentah. Produk setengah jadi ini memiliki peran penting dalam rantai produksi yang lebih luas, karena memungkinkan industri lain mempercepat proses produksi, mengoptimalkan biaya, dan meningkatkan kualitas produk akhir. Keberadaan industri barang setengah jadi juga mendukung integrasi antar sektor industri dan memperkuat ekosistem produksi dalam suatu wilayah atau negara.

3. Berdasarkan Skala Usaha

a. Industri Kecil

Industri kecil merupakan sektor yang memiliki modal terbatas, jumlah tenaga kerja sedikit, serta jangkauan pasar yang biasanya berskala lokal atau komunitas (Shihabudheen, 2013). Contoh nyata termasuk kerajinan tangan, industri makanan rumahan, dan usaha pengolahan lokal.

Meskipun kapasitas produksinya terbatas, industri kecil cenderung fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar, tren konsumen, maupun inovasi produk secara cepat. Namun, keterbatasan modal dan teknologi membuat penetrasi pasar dan skala produksi industri ini relatif rendah dibandingkan dengan industri menengah atau besar. Selain itu, industri kecil berperan penting dalam menyerap tenaga kerja lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.

b. Industri Menengah

Industri menengah memiliki modal dan kapasitas produksi yang lebih besar dibanding industri kecil, serta biasanya melayani pasar regional. Menurut Andriani & Widowati (2017), industri menengah merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha yang berdiri sendiri, serta tidak menjadi anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil maupun usaha besar. Industri ini memiliki kekayaan bersih antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar, di luar tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. Contoh industri menengah termasuk pabrik pengolahan makanan skala menengah, industri sepatu lokal, atau manufaktur peralatan rumah tangga. Industri menengah mampu menerapkan teknologi yang lebih maju, memiliki struktur manajemen yang lebih kompleks, dan mampu meningkatkan efisiensi produksi. Peran ekonomi industri menengah tidak hanya terbatas pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong

pertumbuhan sektor industri lain melalui permintaan bahan baku, penggunaan mesin produksi, dan integrasi rantai nilai di tingkat regional.

c. Industri Besar

Industri besar ditandai oleh modal dan kapasitas produksi yang tinggi, penggunaan teknologi canggih, serta jangkauan pasar yang luas, baik nasional maupun internasional. Secara kuantitatif, industri besar merupakan jenis perusahaan yang menjalankan kegiatan produksi dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih (BPS, 2011). Contoh industri besar antara lain industri otomotif, elektronik, baja, dan kimia. Industri besar sering menjadi motor pertumbuhan ekonomi karena mampu menciptakan nilai tambah yang signifikan, mendorong inovasi teknologi, serta meningkatkan daya saing suatu negara atau wilayah di pasar global. Selain itu, industri besar berperan sebagai pusat pengembangan industri pendukung, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta memacu pertumbuhan sektor ekonomi lain melalui efek multiplier yang luas.

4. Berdasarkan Teknologi dan Proses Produksi

a. Industri Padat Karya (*Labor Intensive*)

Industri padat karya adalah sektor industri yang menekankan peran tenaga kerja manusia dalam proses produksinya, dengan penggunaan mesin dan teknologi yang relatif terbatas. Contohnya seperti kegiatan pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan, peningkatan fasilitas sanitasi lingkungan, serta program penghijauan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah (Rouf, 2024). Sektor ini memiliki keunggulan

dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga berperan penting dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Namun, produktivitas per pekerja cenderung lebih rendah dibandingkan industri padat modal, dan kapasitas produksinya terbatas karena sangat bergantung pada kemampuan tenaga kerja manusia.

b. Industri Padat Modal (*Capital Intensive*)

Industri padat modal merupakan jenis industri yang dalam proses produksinya lebih banyak memanfaatkan penggunaan barang modal atau peralatan produksi dibandingkan tenaga kerja (BPS, 2009). Industri ini mengandalkan mesin, peralatan, dan teknologi canggih untuk menghasilkan barang dalam skala besar secara efisien dan berkelanjutan. Contohnya termasuk industri otomotif, elektronik, baja, dan minyak. Industri ini memiliki produktivitas yang tinggi serta kemampuan menghasilkan output dalam jumlah besar, namun membutuhkan modal awal yang signifikan dan menuntut tingkat manajemen serta perencanaan yang kompleks. Industri padat modal biasanya mendorong inovasi teknologi dalam proses produksi, mempercepat efisiensi, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu memicu perkembangan sektor industri pendukung lainnya.

c. Industri Berbasis Teknologi Tinggi (*High-Tech Industry*)

Industri teknologi tinggi merupakan sektor ekonomi yang ditandai oleh intensitas penggunaan teknologi canggih dalam seluruh proses produksinya. Karakteristik utama industri ini meliputi keterlibatan tenaga kerja berbasis bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and*

Mathematics), pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan (*Research and Development/R&D*), serta penerapan metode produksi berteknologi tinggi yang menghasilkan produk dengan kandungan teknologi tinggi (Noerlina & Mursitama, 2023). Industri ini tidak hanya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi modern, tetapi juga memiliki efek multiplier yang besar terhadap sektor lain, termasuk peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengembangan ilmu pengetahuan, serta munculnya peluang usaha baru. Industri *high-tech* biasanya memerlukan investasi tinggi dalam penelitian dan pengembangan, namun memberikan kontribusi signifikan terhadap daya saing dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

2.1.6. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam periode tertentu sebagai hasil dari berbagai kegiatan ekonomi. PDRB menghitung nilai produksi tersebut tanpa membedakan apakah faktor produksinya berasal dari penduduk setempat maupun pihak luar (Satria et al., 2023). Semakin besar nilai PDRB suatu daerah menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah tersebut semakin meningkat. Kondisi ini mencerminkan bertambahnya kapasitas produksi serta semakin efisiennya pemanfaatan sumber daya, termasuk tenaga kerja, modal, dan teknologi. Sehingga, analisis pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk menilai kinerja ekonomi serta efektivitas kebijakan pembangunan yang diterapkan

(Siahaan et al., 2025), sekaligus sebagai tolok ukur dalam perencanaan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut teori keynesian, rumus sederhana untuk menghitung seluruh pengeluaran akhir di suatu wilayah adalah sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

C : Konsumsi Rumah Tangga

I : Investasi

G : Pengeluaran Pemerintah

X : Ekspor

M : Impor

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai PDRB dari sisi pengeluaran merupakan akumulasi dari konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta selisih antara ekspor dan impor. Konsumsi rumah tangga mencerminkan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, investasi menunjukkan penambahan modal yang digunakan untuk kegiatan produksi, sedangkan pengeluaran pemerintah menggambarkan peran pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi. Sementara itu, selisih antara ekspor dan impor menunjukkan kontribusi perdagangan terhadap pembentukan output suatu wilayah.

2.1.6.1. Teori Produk Domestik Regional Bruto

1. Teori Okun

Hukum Okun yang dikemukakan oleh Arthur M. Okun menjelaskan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, di mana peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran (Rasyida, 2021). Okun menjelaskan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat di atas tingkat potensialnya, output dan aktivitas produksi bertambah sehingga mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Sebaliknya, perlambatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi aktivitas produksi, menekan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan pengangguran.

2. Teori Neokeynes (Harrod-Domar)

Teori Neokeynes yang dikembangkan oleh para ekonom Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh faktor modal, permintaan, serta investasi (Leasiwal, 2014). Ketiga komponen tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan produksi nasional, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Mekanisme ini dapat terjadi dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Semakin tinggi proporsi tabungan yang diinvestasikan ke dalam kegiatan produktif, semakin tinggi potensi pertumbuhan ekonomi. Teori ini juga menyoroti risiko ketidakseimbangan antara pertumbuhan kapasitas produksi dan permintaan, yang dapat menyebabkan ekonomi mengalami kekurangan atau kelebihan output. Dengan

demikian, menurut Harrod-Domar, perencanaan investasi yang tepat dan alokasi sumber daya yang efisien menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

2.1.6.2. Komponen Pertumbuhan Ekonomi

1. Komponen Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sumber Pertumbuhan (*Sources of Growth*)

Pendekatan ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena peningkatan input produksi dan kenaikan produktivitas. Komponennya:

a. Akumulasi Faktor Produksi (*Factor Accumulation*)

1) Modal (*Capital Stock*)

Pertumbuhan modal terjadi ketika investasi meningkat, seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan perluasan infrastruktur. Akumulasi modal memungkinkan perusahaan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga output nasional juga bertambah.

2) Tenaga Kerja (*Labor Force*)

Pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja atau peningkatan partisipasi tenaga kerja mendorong bertambahnya jam kerja dan kapasitas produksi. Ketersediaan tenaga kerja yang lebih besar dapat meningkatkan total output, meskipun produktivitasnya juga menentukan kontribusi terhadap pertumbuhan.

3) Sumber Daya Alam (*Natural Resources*)

Negara dengan SDA yang melimpah cenderung memiliki kapasitas produksi yang lebih besar di sektor-sektor berbasis komoditas. Eksploitasi

sumber daya seperti minyak, gas, mineral, dan lahan pertanian dapat meningkatkan output dan mendorong pertumbuhan, meskipun sifatnya dapat menurun jika tidak dikelola secara berkelanjutan.

b. Pertumbuhan Produktivitas (*Total Factor Productivity/TFP*)

1) Kemajuan Teknologi (*Technological Progress*)

Inovasi teknologi memungkinkan proses produksi menjadi lebih efisien. Teknologi yang lebih baik dapat menghasilkan output lebih banyak dengan input yang sama.

2) Kualitas Sumber Daya Manusia (*Human Capital*)

Pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan meningkatkan produktivitas pekerja. SDM yang berkualitas tinggi mendukung lahirnya inovasi serta mempercepat adopsi teknologi.

3) Peningkatan Efisiensi Ekonomi (*Efficiency Gain*)

Reformasi regulasi, perbaikan sistem kelembagaan, dan peningkatan iklim usaha dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.

3. Komponen Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran (Expenditure Approach)

a. Konsumsi Rumah Tangga (C)

Konsumsi adalah komponen terbesar dalam PDB banyak negara, termasuk Indonesia. Peningkatan konsumsi menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa, mendorong produsen meningkatkan output, dan akhirnya menaikkan pertumbuhan ekonomi.

b. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (I/PMTB)

Investasi meningkatkan kapasitas produksi jangka panjang melalui pembangunan fasilitas produksi, mesin, dan infrastruktur. Semakin besar investasi, semakin besar pula kemampuan perekonomian menghasilkan output di masa depan.

c. Belanja Pemerintah (G)

Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur, subsidi, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya menciptakan permintaan agregat sekaligus mendorong produktivitas nasional.

d. Ekspor Neto ($X - M$)

- Ekspor (X) menambah pendapatan nasional karena menghasilkan devisa.
- Impor (M) mengurangi PDB karena mencerminkan permintaan terhadap barang dari luar negeri.

Jika ekspor lebih tinggi dibanding impor, maka kontribusi sektor luar negeri positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Komponen Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sektor Produksi (*Production Approach*)

Pendekatan ini mengukur pertumbuhan ekonomi melalui kinerja masing-masing lapangan usaha. Setiap sektor memberikan kontribusi yang berbeda terhadap PDB. Menurut Publikasi Badan Pusat Statistik, lapangan usaha dikategorikan menjadi beberapa sektor, diantaranya:

- 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Pengadaan Listrik dan Gas
- 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- 6) Konstruksi
- 7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- 8) Transportasi dan Pergudangan
- 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- 10) Informasi dan Komunikasi
- 11) Jasa Keuangan dan Asuransi
- 12) Real Estate
- 13) Jasa Perusahaan
- 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
- 15) Jasa Pendidikan
- 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- 17) Jasa Lainnya

2.1.6.3. Kegunaan PDRB

Menurut BPS (2021), data mengenai pendapatan regional menjadi salah satu tolok ukur makroekonomi yang mampu menggambarkan situasi ekonomi nasional setiap tahunnya. Beberapa kegunaan dari data tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan besarnya kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah berdasarkan harga pada tahun berjalan, sehingga nilainya masih mencerminkan pengaruh perubahan harga atau inflasi. Semakin besar nilai PDRB ADHB, semakin tinggi kapasitas ekonomi wilayah tersebut, dan begitu pula sebaliknya.
- 2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan perkembangan ekonomi secara riil baik secara agregat maupun per sektor dari satu tahun ke tahun berikutnya. ADHK telah menghilangkan pengaruh inflasi sehingga dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya.
- 3) Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor dapat menggambarkan komposisi ekonomi atau kontribusi masing-masing sektor di suatu daerah. Sektor yang menyumbang nilai besar menunjukkan basis ekonomi wilayah tersebut.
- 4) PDRB harga berlaku berdasarkan komponen pengeluaran dapat memperlihatkan jumlah barang dan jasa yang dialokasikan untuk konsumsi akhir, investasi, maupun perdagangan dengan luar daerah atau luar negeri.
- 5) Distribusi PDRB berdasarkan pengeluaran menunjukkan peran berbagai institusi atau pelaku ekonomi dalam memanfaatkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi.
- 6) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan besarnya nilai PDRB yang dihitung untuk setiap penduduk.
- 7) PDRB per kapita atas dasar harga konstan memiliki fungsi untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil per penduduk di suatu wilayah.

2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kondisi pasar tenaga kerja dan kinerja perekonomian suatu negara (BPS, 2023). Menurut Muhgni et al. (2020), TPT adalah persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur yang dimaksud adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau tidak memiliki pekerjaan tetapi bersedia dan berupaya untuk memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, TPT menggambarkan sejauh mana kapasitas tenaga kerja suatu negara atau wilayah belum terserap dalam kegiatan ekonomi yang produktif.

Secara umum, tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja (Sitorus et al., 2025). Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini dapat mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia serta dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang rendah menunjukkan perekonomian yang mampu menyerap tenaga kerja secara efisien dalam berbagai sektor produksi.

Secara sistematis, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dirumuskan sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Rumus tersebut menunjukkan besarnya persentase penganggur dalam total angkatan kerja pada suatu wilayah. Nilai yang dihasilkan mencerminkan tingkat pemanfaatan tenaga kerja dalam perekonomian, sehingga dapat digunakan untuk melihat kemampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia.

Semakin besar nilai TPT, semakin besar pula proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan.

2.1.7.1. Teori Pengangguran

1. Teori Klasik

Menurut pandangan ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo, pengangguran merupakan kondisi yang bersifat sementara dan dapat diselesaikan secara otomatis melalui mekanisme harga di pasar tenaga kerja (Blanchard, 2021). Dalam teori ini, pasar tenaga kerja akan selalu cenderung menuju kondisi *full employment* (kesempatan kerja penuh) karena penyesuaian terhadap tingkat upah riil. Ketika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, maka upah akan menurun sehingga mendorong perusahaan untuk menambah jumlah tenaga kerja yang diserap. Sebaliknya, apabila permintaan tenaga kerja meningkat, upah akan naik hingga tercapai keseimbangan baru (Prawoto, 2019). Dengan demikian, pengangguran hanya akan muncul apabila terdapat distorsi pada mekanisme pasar, seperti kebijakan upah minimum yang terlalu tinggi atau intervensi pemerintah yang menghambat fleksibilitas upah. Teori ini menekankan bahwa keseimbangan pasar tenaga kerja dapat tercapai secara alami tanpa perlu campur tangan eksternal, karena sistem ekonomi memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan diri melalui mekanisme harga.

2. Teori Keynesian

Berbeda dengan pandangan klasik, John Maynard Keynes melalui karya monumentalnya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* menyatakan bahwa pengangguran dapat bersifat jangka panjang dan tidak dapat

diatasi hanya dengan penyesuaian tingkat upah, karena sumber utama pengangguran terletak pada kekurangan permintaan agregat (*aggregate demand deficiency*) dalam perekonomian (Tarumingkeng, 2024). Ketika konsumsi masyarakat dan investasi swasta menurun, permintaan terhadap barang dan jasa akan berkurang, sehingga perusahaan menurunkan tingkat produksinya dan mengurangi tenaga kerja. Kondisi ini menimbulkan *involuntary unemployment* atau pengangguran tidak sukarela, di mana individu bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku tetapi tidak memperoleh kesempatan kerja. Oleh karena itu, Keynes menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal ekspansif, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak, guna meningkatkan permintaan agregat, memperluas produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru.

2.1.7.2. Jenis-Jenis Pengangguran

Dalam Buku Teori Pengantar Makroekonomi karya Sadono Sukirno (2019:328), dijelaskan bahwa terdapat dua pendekatan utama dalam mengklasifikasikan pengangguran. Kedua cara tersebut digunakan untuk memahami penyebab dan karakteristik pengangguran yang terjadi dalam perekonomian.

1. Berdasarkan Penyebabnya

a. Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran friksional terjadi karena adanya proses penyesuaian antara pencari kerja dan penyedia lapangan pekerjaan. Jenis pengangguran ini bersifat sementara dan wajar terjadi dalam perekonomian yang dinamis.

Misalnya, seseorang yang baru saja lulus kuliah membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, atau pekerja yang pindah dari satu tempat kerja ke tempat lain untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Dengan kata lain, pengangguran friksional muncul akibat adanya waktu tunggu (*time lag*) antara seseorang meninggalkan pekerjaan lama dan mendapatkan pekerjaan baru.

b. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal timbul akibat fluktuasi kegiatan ekonomi secara keseluruhan, terutama ketika terjadi penurunan atau resesi ekonomi. Saat permintaan terhadap barang dan jasa menurun, perusahaan akan mengurangi produksi dan melakukan pengurangan tenaga kerja. Akibatnya, banyak pekerja kehilangan pekerjaan meskipun sebenarnya mereka memiliki keterampilan yang memadai. Pengangguran ini akan berkurang ketika perekonomian kembali tumbuh dan permintaan terhadap tenaga kerja meningkat.

c. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri atau perubahan struktur ekonomi. Misalnya, ketika sektor pertanian mulai menurun dan sektor industri berkembang pesat, tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang pertanian mungkin tidak langsung bisa beradaptasi dengan kebutuhan sektor industri. Akibatnya, mereka menjadi penganggur karena keterampilannya tidak sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Pengangguran jenis ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk diatasi karena melibatkan proses pelatihan dan penyesuaian keterampilan.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang menggantikan peran tenaga manusia dalam proses produksi. Penerapan mesin dan otomatisasi dalam industri dapat meningkatkan efisiensi, tetapi di sisi lain mengurangi kebutuhan terhadap tenaga kerja. Misalnya, di sektor manufaktur, penggunaan robot otomatis dapat menyebabkan berkurangnya tenaga kerja manusia. Pengangguran ini biasanya terjadi di negara yang sedang melakukan modernisasi industri atau menghadapi revolusi teknologi.

2. Berdasarkan Cirinya

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah kondisi ketika seseorang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Jenis pengangguran ini paling mudah terlihat dalam masyarakat karena individu yang mengalaminya tidak memiliki sumber pendapatan tetap. Contohnya adalah lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan, atau pekerja yang diberhentikan dan belum memperoleh pekerjaan pengganti.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi terjadi ketika seseorang sebenarnya bekerja, tetapi produktivitasnya sangat rendah atau kontribusinya terhadap output ekonomi tidak signifikan. Biasanya, jenis pengangguran ini

ditemukan di sektor pertanian tradisional, di mana terlalu banyak tenaga kerja terlibat dalam lahan yang sempit sehingga tidak semua tenaga kerja bekerja secara optimal. Walaupun tampak bekerja, sesungguhnya sebagian dari mereka tidak dibutuhkan dalam jumlah sebesar itu.

c. Pengangguran Bermusim

Pengangguran bermusim adalah pengangguran yang terjadi karena fluktuasi kegiatan ekonomi yang bersifat musiman. Jenis pengangguran ini umum dijumpai pada sektor pertanian, perikanan, atau pariwisata, di mana kegiatan produksi bergantung pada musim tertentu. Misalnya, petani yang hanya bekerja selama musim tanam dan panen akan mengalami pengangguran sementara di luar musim tersebut.

d. Setengah Menganggur

Setengah menganggur menggambarkan kondisi ketika seseorang memiliki pekerjaan tetapi jam kerjanya tidak penuh atau produktivitasnya rendah. Mereka bekerja di bawah kapasitas maksimal, baik karena kekurangan lapangan pekerjaan maupun karena tidak adanya kesempatan untuk bekerja penuh waktu. Misalnya, seseorang yang hanya bekerja beberapa jam dalam seminggu karena tidak ada permintaan kerja yang lebih banyak. Walaupun memiliki pekerjaan, kondisi ini menunjukkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan tenaga kerja.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sofia Dina Salsabila (2025) Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur: Analisis Data Panel	PMA, PDRB	TPAK, TPT	Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan, secara simultan seluruh variabel penelitian juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB.	JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan) ISSN (Online): 2614-2546 Volume 8 Nomor 2 https://jdep.upnjatim.ac.id/index.php/jdep
2.	Wulan Sari, Putri Swastika, & Yuyun Yunarti (2025) Pengaruh Belanja Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga, Indeks Pembangunan Manusia dan Ekspor Terhadap	Konsumsi Rumah Tangga, PDRB	Belanja Pemerintah, IPM, Ekspor	Secara parsial, konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Sementara itu, secara simultan, seluruh variabel dalam model menunjukkan pengaruh yang signifikan.	EKONO MIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 25, No.1 P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Lampung Pada Tahun 2014-2024				https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
3.	Steven Yehezkiel Siahaan, Vecky A. J. Masinambow, Wensy F. I. Rompas (2025)	Konsumsi Rumah Tangga, PDRB	Pengeluaran Pemerintah	Konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta secara simultan seluruh variabel dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 25 Nomor 5 https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie
	Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara				
4.	Fabian Crisandy, Renny Oktafia (2024)	Konsumsi Rumah Tangga, PDRB	Konsumsi Pemerintah	Konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Sidoarjo, serta secara simultan seluruh variabel dalam penelitian ini berpengaruh signifikan.	INDEPE N DENT : Journal Of Economics E-ISSN: 2798-5008 Volume 4 Nomor 1 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php
	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi PDRB: Pendekatan Pengeluaran (Studi di Kabupaten Sidoarjo)				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					/independent
5.	Dina Eka Anggraini, Wahyu Hidayat Riyanto, Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto (2020) <i>Analysis of Economic Growth in Asean Countries</i>	Pengeluaran Konsumsi, Investasi Asing Langsung, PDRB	Inflasi, Pembentukan Modal, Keterbukaan Perdagangan	Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi dan penanaman modal asing memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto. Secara simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap PDRB.	JEP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 18, No. 01, https://ejournal.u mm.ac.id /index.php/jep
6.	Silvia Delvita Ramenggila, Nudiatulhuda Mangun, Santi Yunus (2025) Dampak Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023	PMA, Pertumbuhan Ekonomi	PMDN	Hasil analisis menunjukkan bahwa PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah, dan secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan.	J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.4, No.3 https://ulilbabinst itute.id/index.php/J - CEKI/article/view/ 8413/678 5
7.	Rahmat Ridwan, Nini Sumarni (2024)	PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka	PMDN	Secara parsial, PDRB berpengaruh signifikan dengan arah positif. Secara	Baitul Maal : Journal of Sharia

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaruh Investasi PMDN dan PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Barat Tahun 1994 - 2023			simultan, seluruh variabel bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.	Economics Vol.1, No.2 https://journal.manarulilmi.org/index.php/jse/article/view/12/8
8.	Dwi Mahroji & Saiful Anwar (2020) Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah	Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Penduduk, IPM	Secara parsial, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran. Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi Jawa Tengah.	Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen Vol. 10 No. 1 e-ISSN (2716-3830) https://ejournal.umj.ac.id/ekobis/article/view/3044
9.	Bimoaji, Retno Febriyastuti Widyawati (2025) Analisis Pengaruh Literasi Digital, PDRB dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap TPT di Pulau Jawa	PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka	Literasi Digital	PDRB berpengaruh negatif signifikan. Secara simultan, kedua variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di pulau jawa.	PARAD OKS Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 8 No. 3 e-ISSN : 2622-6383 https://jurnal.feb-umi.id/index.php/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					PARAD OKS
10.	Setiani Br Sinulingga (2021) Pengaruh Kredit UMKM, PMA dan PMDN terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah	Pertumbuhan Ekonomi, PMA, Tingkat Pengangguran Terbuka	Kredit UMKM, PMDN	PMA berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan menurunkan pengangguran. Secara simultan, seluruh variabel penelitian berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pengangguran.	Growth Volume 7, Nomor 2 ISSN : 2460-5204 https://ejournal.upr.ac.id/index.php/jgr/article/download/8400/4372/19152
11.	Anak Agung Fitri Martaningsih D, A.A.I.N Marhaeni (2021) Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Pertumbuhan Ekonomi Bali	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pertumbuhan Ekonomi	Pengeluaran Pemerintah, Penyerapan Tenaga Kerja	Pengeluaran konsumsi rumah tangga tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, namun berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali.	E-Jurnal EP Unud, 10 [2] : 535 - 564 ISSN 2303-017 https://jurnal.harianregional.com/eep/id-66572
12.	Jennifer Joan Pingkan (2025)	Upah Minimum, PDRB	Inflasi, Tenaga Kerja Formal	Hasil estimasi dengan pendekatan <i>fixed effects</i> model	JIEP: Jurnal Ilmu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Analisis Pengaruh Upah Minimum, Inflasi, dan Tenaga Kerja Formal terhadap Produk Domestik Regional Bruto: Studi Panel Data Provinsi di Indonesia (2018-2024)			menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum sebesar 1% berpengaruh terhadap kenaikan PDRB sebesar 1,48% dengan tingkat signifikansi yang sangat kuat ($p < 0,001$). Secara simultan, seluruh variabel dalam model terbukti signifikan.	Ekonomi dan Pembangunan Vol. 8 No. 2, 2025, hal 316-325 ISSN 2746-3249 https://jiep.ulm.ac.id/index.php/jiep/article/view/2725
13.	Hari Winarto, Zumaeroh, Diah Retnowati (2022) Pengaruh Human Capital, Upah Minimum dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Tengah	Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	Human Capital, Angkatan Kerja	Secara parsial, upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor industri. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan di provinsi Jawa Tengah.	Ekonomi s: Journal of Economics and Business, 6(1) https://garuda.kemdiktisaintek.go.id
14.	Fajar Rini Suhadi & Eni Setyowati (2022) Analisis Pengaruh Jumlah	UMK, PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Penduduk, Pendidikan,	Secara parsial, upah minimum dan PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap TPT. Secara simultan, ketiga variabel tersebut	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 10 No 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat			berpengaruh signifikan terhadap TPT.	ISSN: 2338- 8412 e- ISSN : 2716- 4411 https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/2144/2334
15.	Edo Permadi, Eko Chrystanto (2021) Analisa Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Kabupaten/K ota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/K ota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012- 2018	UMK, PDRB, Tingkat Penganggur an Terbuka	Jumlah Penduduk	Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap TPT. Secara parsial, PDRB berpengaruh positif signifikan, sedangkan UMK berpengaruh negatif signifikan terhadap TPT.	OECON OMICUS Journal of Economi cs Vol. 5, No. 2 ISSN: 2548- 6004; e-ISSN: 2715- 4882 https://jurnalfebi.unsa.ac.id/index.php/oje/article/view/530
16.	Hanani Aprilia Adi, Syahlina (2020)	PMA, PDRB	PMDN	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman modal asing berpengaruh positif	Jurnal Ekonomi -QU (Jurnal Ilmu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Analisis: Pengaruh Penanaman Modal Luar Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jambi			dan signifikan terhadap PDRB, dan secara simultan seluruh variabel dalam penelitian berpengaruh signifikan di Provinsi Jambi.	Ekonomi) Vol. 10, No. 1 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu/article/view/8578/5707
17.	Regie Desnine Rahmatullah, Siti Nursifa Azahra, Afiya Hanunnia Naisya, Kesia Yohana Saruksuk, M Maulana Shihhabudin (2025) Analisis Pengaruh PMDN dan PMA Terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2024	PMA, PDRB	PMDN	Penerimaan modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, dan secara simultan seluruh variabel penelitian berpengaruh signifikan.	JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary E-ISSN: 3025- 7980 P- ISSN: 3025- 7999 https://rayanjournal.com/index.php/jerumi
18.	Anggia Lestari Lubis, Murtala (2021)	Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi	Pengangguran	Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan	Jurnal Ekonomi Regional Unimal Volume 4 Nomor 3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaruh Upah Minimum dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh			ekonomi di Provinsi Aceh, dan secara simultan seluruh variabel penelitian berpengaruh signifikan.	E-ISSN : 2615-126X https://ojs.unimal.ac.id/ekonomi_regional/article/view/6748
19.	Wiwik Pramudya Anggraini, Wahyu Dwi Warsitasari (2023) Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Kemiskinan dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur	Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Kemiskinan	Hasil uji parsial menunjukkan bahwa upah minimum berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan secara simultan seluruh variabel dalam penelitian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.	AMAL: <i>Journal of Islamic Economics and Business</i> (JIEB) VOL. 05, NO. 02 https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/6922
20.	Wisda Zulaeha Suwardi (2021) Pengaruh Upah dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2010-2019	Upah, Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan seluruh variabel secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.	<i>Nobel Management Review</i> (NMaR) Volume 2 Nomor 1 E-ISSN : 2723-4983 https://e-jurnal.nobel.ac.id/i

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					ndex.php/ NMaR
21.	Muhammad Yasin, Moh Toriq Alfian, Noviati Mahmudah (2023) Analisis Pengaruh Industri Kecil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang	Industri Kecil, Pertumbuhan Ekonomi	-	Industri kecil terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang, baik secara parsial maupun simultan.	Student Scientific Creativity Journal(SCJ)Vol. 1, No.4Juli2023e-ISSN :2985-3753; p-ISSN :2985-3761 https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/sscj/article
22.	Iwan Ardiansyah, Irham Risuna, Yosa Julianti, Dinar Hafshah Yuflihat (2024) Pengaruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pertumbuhan Ekonomi	-	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2015-2022.	HATTA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Volume 2(2) https://jurnal.stkip-majenang.ac.id/index.php/hatta/article
23.	Siti Khusnul Khotimah, Edy	UMKM, Pertumbuhan Ekonomi	Tenaga Kerja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah unit UMKM dan tenaga	e-Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Surhatono (2023)			kerja UMKM secara simultan berpengaruh terhadap PDRB atau pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban, sementara jumlah unit UMKM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	11, Nomor 1, ISSN Cetak : 2337- 3997 ISSN Online : 2613- 9774 https://www.ojsapresiasiekonomi.itskhatulistiwa.ac.id/
24.	Annisaa Sufi Rabbani, Maulidyah Indira Hasmarini (2024)	Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi	TPAK, IPM, Jumlah UMKM	Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan. Secara bersama-sama, keempat variabel ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Journal of Social and Economics Research Volume 5, Issue2 P-ISSN: 2715-6117 E-ISSN: 2715-6966 https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/view/113/129
25.	Syahira Nasir, Salwaty Jamaludin,	GDP, FDI, Pengangguran	Inflasi, Populasi	Secara parsial, GDP negatif dan signifikan terhadap	<i>Informati on Manage</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sharul Shahida Shakrein Safian, Nazurah Abdul Malek, Muhammad Ridzuan Abdul Aziz (2024)			pengangguran. Secara simultan, keempatnya berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.	<i>ment and Business Review</i> (ISSN 2220 - 3796) Vol. 16, No. 3(S) https://ojs .amhinter national.c om/index .php/imbr /article
	<i>Revisiting Okun's Law : Evidence from Malaysia</i>				
26.	Rica Citra Meisi, Zulfanetti, M. Syurya Hidayat (2021) Pengaruh investasi, tenaga kerja dan unit usaha terhadap PDRB industri pengolahan di Provinsi Jambi Tahun 2000-2016	Investasi, Unit Usaha, PDRB Industri Pengolahan	Tenaga Kerja	Secara parsial, investasi dan unit usaha berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB Industri Pengolahan. Secara simultan, seluruh variabel penelitian berpengaruh signifikan terhadap PDRB Industri Pengolahan di Provinsi Jambi.	E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter Vol. 9. No. 2, ISSN: 2303- 1204 (online) https://on line- journal.u nja.ac.id/ pim
27.	Febriani Sitanggang, Purwaka Hari Prihanto, Etik Umiyati (2019) Pengaruh industri kecil terhadap	Unit Usaha Industri Kecil, Pertumbuha n Ekonomi	Investasi Industri Kecil, Tenaga Kerja Industri Kecil	Secara parsial, unit usaha industri kecil berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, seluruh variabel penelitian berpengaruh signifikan terhadap	E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter Vol. 7. No. 3 ISSN: 2303-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2001-2017			pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.	1204 (online) https://online-journal.unja.ac.id/pim
27.	Abdul Wahab (2022) Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Upah, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan	Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka	Pertumbuhan Penduduk, Inflasi	Pengaruh langsung, mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No.2 https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurep
28.	Abib Audit, Nunik Kadarwati, Goro Binardjo (2024) <i>Impact of Minimum Wage on Unemployment and Worker Welfare Via Economic Growth in West Java (2010-2021)</i>	Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka	Kesejahteraan Pekerja	Upah minimum melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran dan kesejahteraan pekerja.	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan P-ISSN 1412 – 2200 E-ISSN 2548 – 1851 https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article

2.3. Kerangka Pemikiran

2.3.1. Hubungan Tingkat Konsumsi terhadap PDRB

Dalam teori Keynesian, konsumsi rumah tangga terutama ditentukan oleh tingkat pendapatan disposibel, di mana peningkatan pendapatan akan diikuti oleh kenaikan konsumsi meskipun tidak sebesar kenaikan pendapatan tersebut. Peningkatan konsumsi mendorong naiknya permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga produsen meningkatkan output untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kenaikan output ini memperluas aktivitas produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi, yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan PDRB.

Dalam penelitian empiris, W. Sari et al. (2025) menemukan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB di provinsi Lampung pada tahun 2014-2024, di mana daya beli masyarakat yang tinggi meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa sehingga memperbesar aktivitas produksi dan nilai tambah perekonomian daerah. Temuan ini juga didukung oleh Siahaan et al., (2025) dan Crisandy & Oktafia (2023), yang menunjukkan bahwa tingginya tingkat konsumsi masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari kenaikan PDRB di Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2022.

2.3.2. Hubungan Penanaman Modal Asing terhadap PDRB

Penanaman Modal Asing (PMA) berperan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dengan mendorong berjalannya proses produksi dan pengembangan usaha di berbagai sektor. Kehadiran investasi asing membawa tambahan modal, teknologi, serta pola pengelolaan yang memengaruhi produktivitas dan penyerapan

tenaga kerja, sehingga turut membentuk dinamika pendapatan dan konsumsi masyarakat. Dalam kerangka teori pertumbuhan neoklasik Solow, tambahan modal dan kemajuan teknologi tersebut merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat output.

Sejalan dengan temuan Irmawati et al. (2024), yang menyatakan bahwa keberadaan modal asing memiliki kontribusi penting dalam penguatan dan perluasan struktur perekonomian suatu negara. Penelitian Adi & Syahlina (2020) serta Salsabila (2025) juga menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2.3.3. Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap PDRB

Kenaikan UMK dapat meningkatkan daya beli pekerja sehingga mendorong konsumsi rumah tangga dan tingkat PDRB, khususnya di daerah yang bergantung pada permintaan domestik. Peningkatan konsumsi memperluas permintaan barang dan jasa, yang berdampak pada naiknya produksi dan output daerah. Selain itu, upah minimum yang lebih tinggi dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas tenaga kerja sesuai teori upah efisiensi, sehingga memperkuat efisiensi perusahaan dan daya saing ekonomi daerah, selama diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas dan kondisi ekonomi yang stabil.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Lubis & Murtala (2021), yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil uji parsial, upah minimum terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi

ekonomi di suatu daerah. Temuan ini diperkuat juga oleh W. P. Anggraini & Warsitasari (2023) dan Suwardi (2021) yang menemukan bahwa upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3.4. Hubungan Industri Kecil Menengah terhadap PDRB

Industri Kecil Menengah (IKM) mampu menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli, yang selanjutnya mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa hasil produksi IKM akan mendorong peningkatan output, nilai tambah, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, IKM memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan peningkatan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Temuan ini konsisten dengan Ardiansyah et al., (2024) yang menunjukkan bahwa jumlah unit IKM berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut didukung oleh Yasin., et al (2023) yang menemukan bahwa industri kecil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Selain itu, Meisi et al. (2021) juga menunjukkan adanya hubungan positif signifikan antara perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2.3.5. Hubungan PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Peningkatan PDRB mencerminkan naiknya aktivitas produksi dan investasi, yang mendorong perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah pengangguran terbuka menurun

seiring dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja. Hubungan ini sejalan dengan Hukum Okun, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi cenderung diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran. Namun, dampak penurunan pengangguran akan lebih kuat apabila pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan padat karya.

Penelitian Sinulingga (2021) turut memperkuat pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan menurunkan tingkat pengangguran. Temuan tersebut sejalan dengan Bimoaji & Widyawati (2025) yang menyatakan bahwa PDRB secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, sehingga peningkatan aktivitas ekonomi mampu memperluas kesempatan kerja. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Suhadi & Setyowati (2022) yang menegaskan adanya hubungan negatif signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran.

2.3.6. Hubungan Tingkat Konsumsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Melalui PDRB

Perubahan tingkat konsumsi masyarakat tercermin pada dinamika aktivitas ekonomi daerah. Peningkatan konsumsi mendorong kenaikan permintaan agregat yang kemudian direspons oleh sektor produksi melalui perluasan kapasitas usaha dan peningkatan output. Ekspansi kegiatan produksi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah regional dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya output, kebutuhan terhadap faktor produksi, termasuk tenaga kerja, turut bertambah sehingga membuka peluang kerja

baru dan memberikan efek tidak langsung terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui jalur pertumbuhan ekonomi.

Daya beli masyarakat yang tercermin dari kemampuan pengeluaran juga berperan sebagai stimulus bagi keberlanjutan aktivitas usaha. Ketika daya beli menguat, perputaran transaksi barang dan jasa menjadi lebih intensif, memperbaiki pendapatan pelaku usaha, serta menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi ekspansi bisnis. Kondisi tersebut memperbesar kebutuhan tenaga kerja untuk mendukung distribusi, pemasaran, dan layanan pendukung lainnya, sehingga memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor. Temuan empiris menunjukkan bahwa penguatan konsumsi rumah tangga berkorelasi dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Sinulingga, 2021; Crisandy & Oktafia, 2023; W. Sari et al., 2025).

2.3.7. Hubungan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Melalui PDRB

Masuknya Penanaman Modal Asing memperluas struktur kegiatan ekonomi melalui pembangunan industri dan pengembangan sektor produktif. Investasi tersebut mendorong diversifikasi lapangan usaha serta meningkatkan kapasitas produksi di berbagai sektor, sehingga memperkuat basis ekonomi daerah. Perluasan sektor-sektor produktif ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah regional, tetapi juga menciptakan kesempatan kerja baru yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang.

Selain itu, penanaman modal asing berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian melalui transfer teknologi, manajemen, dan

integrasi ke dalam jaringan produksi global. Dampak tersebut mendorong peningkatan produktivitas dan output ekonomi yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB (Rahmatullah et al., 2025; Salsabila, 2025). Pertumbuhan yang dihasilkan kemudian memperluas skala kegiatan ekonomi dan meningkatkan permintaan tenaga kerja di berbagai bidang, sehingga berpotensi menekan tingkat pengangguran (Suhadi & Setyowati, 2022).

2.3.8. Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Melalui PDRB

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota berkaitan dengan dinamika produksi dan kinerja ekonomi daerah. Standar upah yang lebih tinggi mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja serta memotivasi peningkatan kinerja dan keterampilan tenaga kerja. Kondisi tersebut berdampak pada efisiensi dan kualitas proses produksi, sehingga mendukung stabilitas kegiatan usaha dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah. Stabilitas ini memberikan peluang bagi sektor usaha untuk melakukan ekspansi dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas.

Kenaikan upah minimum juga meningkatkan pendapatan pekerja sehingga memperkuat daya beli masyarakat. Penguatan daya beli mendorong permintaan terhadap barang dan jasa, membuat aktivitas perdagangan dan produksi semakin aktif dan tercermin dalam peningkatan PDRB (Pingkan, 2025; Rabbani & Hasmarini, 2024; Winarto et al., 2022). Kenaikan upah tersebut juga memperluas kapasitas konsumsi rumah tangga yang mendorong perusahaan meningkatkan

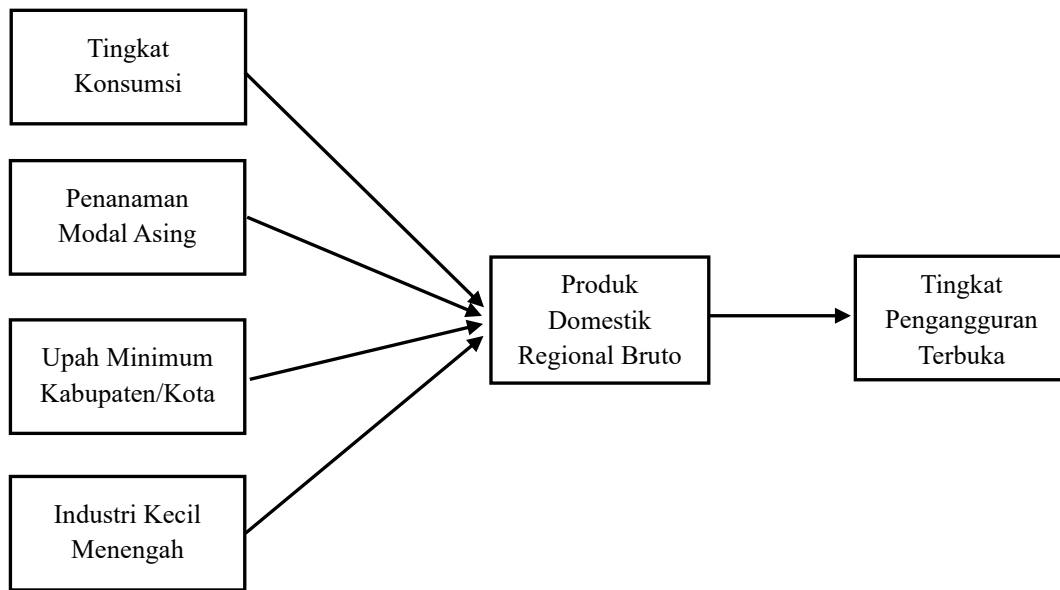
output dan memperluas kegiatan usaha, sehingga kebutuhan tenaga kerja bertambah dan pengangguran menurun (Audit et al., 2024).

2.3.9. Hubungan Industri Kecil Menengah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Melalui PDRB

Perkembangan Industri Kecil Menengah memperkuat perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan peningkatan nilai tambah hasil produksi. Keberadaan IKM mendorong tumbuhnya berbagai jenis usaha baru serta memperluas keterkaitan antarsektor dalam kegiatan ekonomi. Struktur ekonomi yang semakin beragam tersebut meningkatkan ketahanan ekonomi daerah sekaligus membuka kesempatan kerja, terutama bagi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang bervariasi.

Bertambahnya jumlah unit IKM mencerminkan meningkatnya aktivitas usaha produktif yang berkontribusi terhadap pembentukan output regional dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Ardiansyah et al., 2024; Yasin et al., 2023; Sitanggang et al., 2019). Peningkatan jumlah usaha tersebut memperbesar kapasitas produksi barang dan jasa di tingkat daerah. Karena IKM umumnya bersifat padat karya, perluasan kapasitas produksi diikuti oleh peningkatan kebutuhan tenaga kerja, terutama pada usaha skala kecil yang tersebar di berbagai wilayah. Penyerapan tenaga kerja yang semakin luas kemudian mengurangi jumlah angkatan kerja yang belum terserap, sehingga tingkat pengangguran cenderung menurun (Nasir et al., 2024).

Untuk memperjelas hubungan antar variabel yang diteliti, maka disusun kerangka pemikiran penelitian sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang dibuat berdasarkan teori, penelitian sebelumnya, atau pengamatan, dan kemudian akan diuji secara empiris melalui penelitian. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga tingkat konsumsi, penanaman modal asing, upah minimum, dan industri kecil menengah berpengaruh positif terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2024.
2. Diduga PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2024.
3. Diduga tingkat konsumsi, penanaman modal asing, upah minimum, dan industri kecil menengah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka melalui PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2024.